

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020
DI KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Mohamad Sutan Adie

NPP. 29.1689

Asdaf Kabupaten Malinau, Provinsi
Kalimantan Utara

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: sutanadie321@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Due to the Covid-19 pandemic, the 2020 Pilkada has been postponed until December 2020. The implementation of the Pilkada in Malinau Regency also encountered several obstacles in holding simultaneous elections, where Due to the COVID-19 pandemic, transportation access to several sub-districts in remote areas and near the border is very difficult, there are even villages that do not have a signal and many roads are damaged. However, the political participation of the people of Malinau Regency is high, namely 82.5%, the percentage exceeds the target to be achieved by the government **Objective:** the purpose of this study was to find out how the political participation of the people of Malinau Regency and the dominant factors influencing participation Politics of the people of Malinau Regency. **Methods:** the researchers in this study used descriptive qualitative methods. **Results/Findings:** The result is that the factors that most influence the increasing participation of the people of Malinau Regency are modernization and intellectuals where there is updating of data on the number of permanent voter lists, KPU members door to door registering the number of permanent voters in Malinau Regency so that many people those who have not voted in 2015 have been able to vote in the 2020 regional elections. **Conclusion:** Although political participation of the people in Malinau Regency has increased, socialization and political education must continue to be carried out and reproduced, so that people who continue to considering their rights as good citizens, namely to remain active in political activities and this will have a good impact on the regional elections in the next period.

Keywords: Pilkada, Covid-19, politics, participation, KPU

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2020 di 270 daerah awalnya akan di selenggarakan pada September 2020. Namun, karena pandemi Covid – 19 masih mewabah, Pilkada 2020 di tunda hingga Desember 2020. Pelaksanaan pilkada Kabupaten Malinau juga mengalami beberapa kendala dalam penyelenggaraan Pilkada serentak, di mana adanya pandemi covid-19, akses transportasi ke beberapa kecamatan yang berada di pelosok dan dekat perbatasan sangat sulit, bahkan terdapat juga desa yang tidak mempunyai sinyal dan banyak nya jalan yang rusak. Namun partisipasi politik masyarakat Kabupaten Malinau tergolong tinggi yaitu 82,5 % presentase tersebut melebihi target yang ingin di capai pemerintah. **Tujuan:** tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat Kabupaten Malinau dan Faktor dominan yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat Kabupaten Malinau **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. **Hasil/Temuan:** hasil nya adalah yang di mana faktor yang paling memengaruhi meningkatnya partisipasi masyarakat Kabupaten Malinau adalah modernisasi dan kaum intelektual di mana ada nya pemuktahiran data jumlah daftar pemilih tetap, para anggota KPU secara pintu ke

pintu mendata jumlah pemilih tetap masyarakat Kabupaten Malinau sehingga banyak masyarakat yang pada tahun 2015 belum memilih sudah bisa memilih pada pilkada tahun 2020 **Kesimpulan:** Meskipun partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Malinau telah meningkat namun sosialisasi dan pendidikan politik harus tetap di laksanakan dan di perbanyak, agar masyarakat yang terus mengingat akan hak nya sebagai warga Negara yang baik yaitu tetap aktif dalam kegiatan politik serta hal tersebut akan membawa dampak baik bagi pilkada pada periode selanjutnya.

Kata kunci: Pilkada, Covid-19, Politik, Partisipasi, KPU



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia saat ini merupakan Negara demokrasi yang memiliki berbagai macam budaya dan keanekaragaman suku. Dimana Indonesia juga merupakan Negara yang memiliki banyak pulau sehingga penyelenggaraan pesta demokrasi yaitu pemilihan langsung secara serentak akan menjadi tantangan bagi instansi-instansi terkait untuk melaksanakan tugas nya agar demokrasi di Indonesia bisa terselenggara dengan adil, aman dan baik. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi seperti halnya Pemilu. Oleh karena itu masyarakat tidak dapat lepas dari yang namanya pemilu karna itu adalah alat demokrasi rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih.

Demokrasi merupakan pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. di dalam sebuah demokrasi setiap warga negara berhak berpartisipasi dan melaksanakan demokrasi dengan langsung atau melalui perwakilan. Setiap negara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda. Di beberapa negara, istilah demokrasi banyak digunakan sebuah negara untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang dianut. Indonesia menjadi salah satu negara yang juga menganut sistem pemerintahan secara demokrasi. Negara demokrasi memberikan hak bebas berpendapat kepada masyarakatnya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pelaksanaan pilkada Kabupaten Malinau juga mengalami beberapa kendala dalam penyelenggaraan Pilkada serentak, di mana akses transportasi ke beberapa kecamatan yang berada di pelosok dan dekat perbatasan sangat sulit, bahkan terdapat juga desa yang tidak mempunyai sinyal dan banyak nya jalan yang rusak. Di lansir oleh Kompas.com Keterbatasan infrastruktur itu juga dialami di banyak wilayah lain Kaltara. Dari lima kabupaten dan kota, hanya Kota Tarakan yang memiliki jaringan listrik, jalan, akses pendidikan, dan internet bagus. Keterbatasan masih banyak dijumpai di Malinau, Nunukan, Bulungan, dan Tana Tidung . sangat ironis dimana Pilkada Serentak 2020 di daerah perbatasan banyak sekali mengalami kendala dimana partisipasi politik masyarakat sangat penting untuk menentukan kepala daerah yang akan memimpin daerah mereka ke depannya namun sarana dan prasarana di beberapa kecamatan kurang memadai. Hal ini dapat memengaruhi nasionalisme penduduk di perbatasan dimana negara tetangga cenderung memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi, kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik dan akses yang lebih mudah. perhatian pemerintah masih sangat minim sehingga kehidupan mereka sebagian besar bergantung pada negara tetangga Malaysia

Kendala yang dihadapi, partisipasi politik di Kabupaten Malinau menurut data KPU Kabupaten Malinau malah melebihi target . Di dibandingkan dengan Pilkada tahun 2015 partisipasi pemilih meningkat signifikan, menurut data KPU Kabupaten Malinau jumlah partisipasi politik pada pilkada 2015 masih tergolong rendah Peningkatan presentase jumlah pemilih ini berbanding terbalik dengan minimnya pembinaan politik di Kabupaten Malinau yang di lakukan oleh pemerintah setempat. Hal ini memungkinkan adanya faktor lain yang membuat tingkat partisipasi politik di Kabupaten Malinau meningkat secara signifikan dalam waktu 5 tahun.

1.3. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu partisipasi politik masyarakat pada pilkada serentak. Telah ada beberapa literatur yang membahas terkait masalah tersebut, Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan Peneliti kaji sebagai bahan referensi penelitian. Penelitian sebelumnya ini memiliki tema yang serupa dengan tema yang akan peneliti ambil dalam penelitian ini. Penelitian sebelum nya oleh Atiek

Lestari dengan judul kurangnya Partisipasi Politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Wakatobi Meneliti tentang faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian sebelumnya oleh Khoirul Saleh dan Achmat Munif dengan judul Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi Meneliti dan menganalisis budaya politik masyarakat untuk membangun kesadaran politik.. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Samuel risal dengan mengambil judul partisipasi politik masyarakat perbatasan negara dalam pilkada serentak di Kabupaten Malinau oleh Samuel risal, Meneliti tentang penyebab dan faktor kurangnya partisipasi politik di Kabupaten Malinau pada pilkada tahun 2015

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang menjadi perbedaan dari tiga referensi tersebut dengan penelitian ini adalah perbedaan fokus masalah pada penelitian ini yaitu tentang faktor peningkatan jumlah partisipasi yang signifikan dari tahun 2015 yang di mana Pendidikan politik dan sarana prasarana di Kabupaten Malinau masih di bilang kurang memadai selain itu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat Kabupaten Malinau serta mengetahui Faktor-faktor yang memengaruhi meningkatnya partisipasi politik di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu penelitian berawal dari suatu teori, kemudian peneliti mengumpulkan data di lapangan guna mendapatkan pembenaran ataupun penolakan terhadap teori yang dipakai oleh peneliti. Teori yang digunakan yaitu teori Hambatan Utama Perempuan (NIAS, 2008) dengan 5 dimensi, yaitu dimensi Sistem Pemilihan, dimensi Organisasi Perempuan dan Partisipasi Perempuan, dimensi Media Massa, dimensi Kemauan Perempuan, dan dimensi Budaya.

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur kepada beberapa informan. Dari pihak penyelenggara pemilihan umum, Peneliti mewawancarai Ketua KPU bapak M. Zen A. Karim dan dua Anggota KPU bapak Kuad Suwarno dan ibu Mu'minah Daeng Barang. Dari pihak DPRD, peneliti mewawancarai Sekretaris Dewan ibu Yulianti dan lima Anggota DPRD perempuan ibu Nurlaela Syarif, ibu Azizah Fabanyo, ibu Heny Sutan, ibu Nurain, dan ibu Sunarti. Terakhir, peneliti mewawancarai beberapa perwakilan masyarakat di Kota Ternate, Yaitu bapak Hanif dan bapak Soddiq selaku ketua RT di Kelurahan Kalumata, dan ibu Dewi, ibu Ani, dan ibu Rahma selaku perwakilan perempuan di Kota Ternate. Selain dari wawancara, peneliti juga mendokumentasikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pemilihan umum DPRD Kota Ternate di KPU Kota Ternate. Kemudian peneliti juga mendokumentasikan segala kegiatan wawancara dalam bentuk foto, video, rekam suara, dan lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 serta Faktor-Faktor yang dominan dalam partisipasi politik di Kabupaten Malinau:

3.1. Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Pada Pilkada Serentak Tahun 2020

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia. Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 berhadapan dengan pandemi *covid-19* sehingga pelaksanaan pilkada tahun 2020 berbeda dengan pelaksanaan harus dengan protokol kesehatan. Jumlah partisipasi politik masyarakat pada saat pilkada serentak di Kabupaten Malinau melebihi target yang ingin di capai pemerintah pusat padahal pada tahun pada 2015 jumlah partisipasi politik masyarakat kurang dari target. Hal ini dapat kita ketahui melalui beberapa faktor seperti modernisasi, struktur kelas sosial, konflik, ruang lingkup dan kaum intelek. bahwa jumlah pemilih pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Malinau Berjumlah 44.436 jiwa sedangkan pada tahun 2020 meningkat hingga 50.682 jiwa meningkat pesat dari Pilkada tahun 2015. Peningkatan ini terjadi di tengah-tengah kendala yang di hadapi pada saat pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Malinau yang di mana pendidikan politik yang kurang serta akses transportasi ke beberapa kecamatan yang berada di pelosok dan dekat perbatasan sangat sulit, bahkan terdapat juga desa yang tidak mempunyai sinyal dan banyak nya jalan yang rusak.

3.2. Modernisasi

Modernisasi dalam partisipasi politik adalah kondisi dimana kemajuan di segala bidang yang berimplikasi pada kesadaran politik dan kesadaran politik itu menuntut keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik agar dapat merubah atau memengaruhi nasibnya sendiri. Modernisasi juga memengaruhi peningkatan menulis dan literasi masyarakat, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa yang menjadi lebih luas dan modern hal ini menyebabkan masyarakat dapat menilai sendiri dan mencari informasi sendiri tentang pengetahuan politik. Komersialisasi, urbanisasi dan Pendidikan merupakan indikator dari modernisasi yang dimana menjadi pengukur adanya modernisasi di Kabupaten Malinau.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau melakukan pendidikan politik melalui websitenya yaitu <https://malinaukabppid.kpu.go.id/> yang memuat informasi tentang profil KPU serta informasi lainnya mengenai pilkada.

Peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada ketua KPU Kabupaten Malinau dan Ketua KPPS Bapak Candra Lesmana pada tanggal 15 Januari 2022 guna menggali informasi dan pengetahuan terkait pengaruh modernisasi pada partisipasi politik masyarakat di kabupaten Malinau. Ketua KPU Kabupaten Malinau Mengatakan :

“Tidak bisa di pungkiri bahwa modernisasi banyak mempengaruhi masyarakat dalam hal partisipasi politik, terutama di Kabupaten Malinau dimana banyak informasi terbaru terkait politik yang mudah di akses lewat smartphone kita sehingga membuka mata masyarakat dalam kegiatan politik, terlebih lagi di daerah yang dulunya tidak ada jaringan namun sekarang memiliki jaringan akses internet. Namun menurut saya mengapa presentase peningkatan jumlah partisipasi politik masyarakat meningkat pesat itu adalah hasil dari pemuktakhiran data para pemilih yang di update oleh anggota KPU selain itu pertumbuhan laju penduduk juga mempengaruhi meningkatnya jumlah partisipasi politik.”

Hal senada juga dikatakan oleh informan Ketua KPPS (15 Januari 2022) Kabupaten Malinau mengatakan :“Modernisasi banyak mengubah jalan berpikir masyarakat, dulu bapak hanya melihat informasi dari koran sekarang informasi sudah bisa di gali tanpa terbatas di mana saja, jadi modernisasi yang paling memengaruhi itu ada di media massa, dan untuk urbanisasi menurut bapak tidak memengaruhi partisipasi politik disini.”

Sedangkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Syamsudin Abdullah (15 Januari 2022) beliau mengatakan :

“Karena Kabupaten Malinau belum semaju kota Tarakan menurut saya hanya orang yang mau buka lahan sawit atau tambang batu bara dan pendatang yang buka usaha disini juga tidak terlalu banyak. Orang-orang Kabupaten Malinau pun jika ingin rekreasi pergi ke kota Tarakan karena di sana ada Ramayana, jadi menurut

saya tidak begitu berpengaruh yang namanya urbanisasi dalam partisipasi politik disini.”

Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU, Ketua KPPS dan tokoh masyarakat Bapak Syamsudin Abdullah (ustadz) di ketahui bahwa modernisasi merupakan salah satu penyebab utama meningkatnya presentase jumlah pemilih di Kabupaten Malinau. Modernisasi membuat perkembangan media massa yang semakin meluas serta meningkatnya literasi masyarakat yang memicu pertumbuhan komunikasi dunia maya, pada era sekarang media sosial sangat di minati oleh tokoh politik di Indonesia maupun luar negeri di mana media sosial menjadi wadah untuk para tokoh politik berkampanye. Bukan hanya media yang memberi pengaruh terhadap partisipasi politik, pemutakhiran data oleh pihak KPU juga menyebabkan banyak nya jumlah pemilih yang baru terdaftar. seperti ucap bapak Lanisias dalam menjawab pertanyaan peneliti Hal ini yang menjadi salah satu penyebab utama peningkatan jumlah pemilih di Kabupaten Malinau.

3.3. Struktur Kelas Sosial

Perubahan struktur kelas sosial baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang makin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi. Hal ini menyebabkan munculnya tuntutan-tuntutan baru yang yang pasti akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. perubahan sosial adalah perubahan pada kebudayaan atau kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat.

Perubahan ini dapat terjadi pada salah satu anggota masyarakat atau seluruh lapisan masyarakat. perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya. Indikator dari struktur social ini adalah pekerjaan dan status social yang dimana indikator tersebut dapat membantu menentukan seberapa banyak struktur kelas social berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat Kabupaten Malinau.

Peneliti bertanya dengan salah satu masyarakat yaitu Ibu Hanifah (Pedagang) (16 Januari 2022) tentang pengaruh perubahan struktur sosial dalam partisipasi politik masyarakat.

“Menurut saya perubahan struktur sosial bukan lah pengaruh yang begitu dominan dalam partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Malinau karena tidak ada perubahan signifikan dalam ekonomi, status sosial dan kekuasaan, demikian juga dalam pendidikan, pangkat dan golongan yang menjadi pengaruh partisipasi politik (Kabupaten Malinau)”

Hal tidak senada di sampaikan oleh informan Ibu Affifah luqyanas (IRT) (16 Januari 2022) mengatakan :

“Menurut saya ada perubahan sosial yang menjadi pengaruh partisipasi politik disini, adalah masyarakat kelas bawah yang ada di pelosok yang belum memiliki teknologi seperti di pusat Kabupaten Malinau, dimana Jaringan tidak memadai disana dan satu lagi yaitu penggunaan smartphone, jaman saya dulu mungkin tidak banyak yang punya handphone canggih seperti sekarang ini, sekarang informasi dan pengetahuan dapat di cari kapanpun dan dimanapun. Jadi kita bisa mencari tahu informasi tentang calon yang akan kita pilih.”

Adapun hasil wawancara dengan tokoh masyarakat johny yabo (16 Januari 2022) terkait dengan pengaruh perubahan struktur sosial dengan partisipasi politik masyarakat adalah sebagai berikut :

“Kalau perubahan yang ada disini mungkin hanya dari dampak pandemi covid-19 , sekarang kan banyak yang dalam kegiatan nya melalui daring, kemana-mana menggunakan masker dan jaga jarak dan pengaruh nya terhadap partisipasi politik menurut saya orang-orang yang kesulitan dalam ekonomi saat pandemi berlangsung pasti ingin pemimpin yang dapat membuat kebijakan yang tepat sasaran.”

Berdasarkan wawancara Peneliti di atas dapat di ketahui bahwa perubahan struktur sosial bukanlah penyebab utama meningkatnya partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Malinau walaupun bukan penyebab utama tapi perubahan struktur sosial juga memberikan pengaruh dalam partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Malinau karena adanya pandemi.

3.4. Konflik

Minat Konflik yang di maksud adalah konflik yang tercipta diantara kelompok- kelompok pemimpin politik yang sedang bersaing memperebutkan kekuasaan. Jika timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang bisa digunakan oleh kelompok- kelompok elite ini adalah mencari dukungan rakyat sebanyak-banyak nya demi kepentingan politiknya.

Indikator dari konflik ialah kekuasaan dan pendukung dimana dua indikator ini dapat memberi gambaran bagaimana konflik yang terjadi di Kabupaten Malinau.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada tokoh adat Bapak Usat Njau dan Kepada tokoh masyarakat Bapak Johny Laing (19 Januari 2022) beliau mengatakan :

“Belum terdengar adanya konflik antara pemimpin politik disini dalam persaingan kekuasaan, tapi kalau antar pendukung nya tentu saja ada namun tidak begitu signifikan. contoh pendukung menyebarkan isu-isu buruk tentang calon bupati hal tersebut bisa di kegiatan politik. disini tidak ada massa yang anarkis seperti di luar kota sana.”

Adapun hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat Bapak Johny laing (19 Januari 2022) juga mengatakan hal serupa terhadap konflik yang terjadi Kabupaten Malinau :

Belum pernah saya dengar konflik antar pemimpin kelompok elite disini, saya juga tidak tahu misalnya ada konflik tersebut tapi saya belum pernah mendengar, kalau antar tim sukses saya tahu itu sering terjadi tapi tidak pernah sampai anarkis.

Dapat dilihat hasil dari wawancara diatas bahwa konflik antar pemimpin elite di Kabupaten Malinau belum terjadi, sedangkan konflik yang sering muncul malah dari pendukung mereka sendiri. Pemimpin politik sudah seharusnya menjaga nama baik mereka di depan publik dan tidak melakukan gerakan tambahan yang bisa merusak penilaian masyarakat. Namun sebenarnya konflik juga dapat di gunakan sebagai senjata politik dimana konflik dapat di manfaatkan untuh menjatuhkan lawan politik. Konflik yang di maksud bukan konflik secara fisik namun berupa persekusi dari suatu kelompok kepada kelompok yang lain. Konflik yang di lakukan dapat berupa ujaran kebencian, penyebaran fitnah dan informasi hoax.

3.5. Ruang Lingkup

Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam berbagai unsur seperti ekonomi, sosial dan budaya, dan Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik. dalam Urusan Sosial, Ekonomi dan Kebudayaan. Kelas menengah yang di maksud adalah aktivis pemerintah yang di selimuti oleh berbagai kepentingan politis. Kelas menengah ini lebih cenderung ingin berperan menjadi seorang controller daripada intermediary di karenakan kelas menengah lebih mengejar keuntungan materi dan status sosial daripada melakukan sebuah perubahan sosial. Ekonomi dan kebudayaan adalah indikator dari dimensi ruang lingkup dimana indikator ini yang nantinya akan mengukur sejauh mana pengaruh ruang lingkup dalam partisipasi politik masyarakat Kabupaten Malinau

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat terkait dengan pengaruh meluasnya ruang lingkup pemerintahan dengan Bapak Haris Suyatno (PNS) (19 Januari 2022):

Meluasnya ruang lingkup pemerintahan menurut saya untuk Kabupaten Malinau sendiri tidak ada nilai penting yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat disini.

Hal serupa juga di katakan oleh masyarakat Bapak Mohamad Soleh (wiraswasta) (18 Januari 2022) :

“Aktivis pemerintah disini belum ada melakukan hal seperti itu, maksudnya belum ada orang dari pemerintahan yang ikut campur dengan masalah sosial, ekonomi dan kebudayaan yang menyebabkan timbulnya tuntutan politik baru.”

Adapun tanggapan dari tokoh masyarakat Bapak Hainidar Airlangga (Kepala desa) (19 Januari 2022) mengatakan :

“Aktivis pemerintah tidak bisa sembarangan melakukan inisiatif di Kabupaten Malinau terkait ambisinya untuk tujuan politik, karena disini masyarakat nya masih kental dengan adat yang di anut dan juga gampang terprovokasi. Malah nanti akan menjadi bumerang bagi oknum tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa aktivis pemerintah atau kelas menengah belum dapat memberi pengaruh besar pada partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Malinau namun keberadaan mereka masih belum di ketahui masyarakat di Kabupaten Malinau, peneliti memahami bahwa tidak di semua tempat terdapat aktivis pemerintahan yang bisa memanfaatkan keadaan sosial, ekonomi dan budaya di daerah nya.

Berdasarkan uraian di atas, budaya politik yang ada di Kota Ternate menjadi hambatan utama untuk para perempuan. Budaya politik tersebut yaitu budaya patriarki, budaya politik identitas dan kedekatan, serta budaya money politics.

3.6. Kaum Intelektual

Kaum intelek yang di maksud adalah kaum yang mempunyai pengetahuan lebih di masyarakat dan dapat memberi pengaruh politik atas keberadaannya di masyarakat yang dimana kaum intelektual ini dengan ide-ide nya membangun tuntutan-tuntutan baru yang harus di penuhi oleh pemerintah. Indikator kaum intelektual adalah komunikasi dan gagasan yang dimana indikator tersebut yang dapat mengukur partisipasi politik di Kabupaten Malinau.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ketua KPU terkait dengan Kaum Intelektual (15 Januari 2022) :

“Menurut saya kaum intelek di sini adalah tokoh masyarakat dan tokoh adat disini, di mana mereka yang mempunyai ide-ide yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat. Kebanyakan masyarakat disini dalam hal memilih calon mereka mengikuti pilihan dari tokoh masyarakat atau tokoh adat di sekitar. Jadi menurut saya kaum intelek juga punya pengaruh di peningkatan partisipasi politik masyarakat.”

Hal serupa juga di katakan oleh masyarakat Bapak Arif Setyawan (Guru Sd) (19 Januari 2022) sebagai berikut :

“Di tempat saya di kecamatan Malinau kota ada satu tokoh masyarakat yang di mana beliau juga adalah seorang ulama, beliau merupakan tim sukses salah satu calon Bupati pada waktu itu, warga di sekitar sini kebanyakan mengikuti pilihan beliau dan menjadi pendukung dari calon bupati tersebut termasuk saya, karena masyarakat di sekitar sini sangat segan kepada beliau.”

Sedangkan hasil wawancara dengan informan tokoh masyarakat Bapak Syamsudin Abdullah (ustadz) (18 Januari 2022) berkata :

“Karena saya adalah tim sukses salah satu calon bupati, jadi saya selalu ikut kemana saja beliau berkampanye, nah mungkin dari situ banyak warga yang melihat saya, maka mereka juga ikut mendukung beliau. Tapi saya tidak pernah mengajak atau pun memaksa masyarakat untuk memilih beliau namun itu kehendak mereka sendiri.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita pahami kaum intelektual masih sangat memengaruhi partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Malinau yang dimana mereka menjadi tumpuan beberapa golongan masyarakat untuk menentukan pilihan. Sangat di harapkan kaum intelektual dapat membawa bangsa Indonesia ke zaman budaya politik yang lebih berkualitas. Di dalam hasil wawancara informan mengartikan bahwa kaum intelektual ini adalah sosok yang di segani di lingkungan masyarakat seperti tokoh masyarakat dan tokoh adat yang dimana pilihan mereka dapat menjadi alternative jika masyarakat bingung untuk memilih calon

pemimpin daerah.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan hasil data-data yang selama ini peneliti peroleh dari penelitian yang di lakukan di lapangan maka peneliti menarik beberapa kesimpulan yaitu partisipasi politik adalah kegiatan politik yang di lakukan oleh individu atau sekelompok orang yang aktif dalam memengaruhi pengambilan keputusan politik, seperti pemilihan kepala Negara, kepala desa dan lain-lain. Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Malinau tergolong tinggi yaitu 82,5 % presentase tersebut melebihi target yang ingin di capai pemerintah. Hal ini di buktikan berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan peneliti di lapangan. Meski pun pelaksanaan pilkada tahun 2020 di hadapkan dengan banyak kendala, namun partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Malinau meningkat dari pilkada tahun 2015 yang hanya 67,67 % jumlah pemilih tetap. Hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2020 masyarakat Kabupaten Malinau lebih aktif dalam kegiatan politik yaitu pada pemilihan umum kepala daerah, masyarakat Kabupaten Malinau telah sadar akan hak sebagai warga negara untuk aktif dalam kegiatan politik sebagai wujud dari warga Negara yang baik.

Banyak faktor yang dapat memengaruhi partisipasi politik, diantara nya ada 5 yaitu, modernisasi, konflik antar pemimpin politik, ruang lingkup, kaum intelektual dan struktur kelas sosial yang di mana faktor yang paling memengaruhi atau yang paling dominan meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Malinau adalah modernisasi dan kaum intelektual di mana ada nya pemuktakhiran data jumlah daftar pemilih tetap, para anggota KPU secara pintu ke pintu mendata jumlah pemilih tetap masyarakat Kabupaten Malinau sehingga banyak masyarakat yang pada tahun 2015 belum memilih sudah bisa memilih pada pilkada tahun 2020. Selain pemuktakhiran data media sosial memengaruhi partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Malinau yang di mana pertukaran informasi dengan media sosial begitu cepat sehingga informasi yang di perlukan terkait dengan politik dapat dengan mudah di dapatkan. Hal itu menambah wawasan dan kesadaran masyarakat Kabupaten Malinau akan hak nya sebagai warga Negara yang baik untuk aktif dalam politik praktis.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian

Arah Masa Depan Penelitian : Saran saya kepada pemerintah Kabupaten Malinau yaitu segera perbaiki apa yang menjadi kendala dalam pilkada tahun 2020 sarana dan prasana perlu di perbaiki, seperti banyak jalan yang rusak dan masih ada daerah yang belum terjangkau jaringan. Hal tersebut akan memudahkan pihak KPU dalam menjalankan tugas nya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada para informan khususnya para anggota KPU, Tokoh Adat dan Tokoh masyarakat, serta masyarakat yang telah meluangkan waktu yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Seta, 2007. *Pengantar Ilmu Politik*. Edited by Ika Yuliana K. *Jogjakarta: Indie Book Corner*. Edisi pert. Jogjakarta: Indie Book Corner.
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi revi. Vol. 148. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Risal, Semuel, and Eka Pratiwi, 2019. "Partisipasi Politik Masyarakat Perbatasan Negara Dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Malinau." *Dia* 17, no. 2 :11–32.
- Dr. Sandu Siyoto, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Edited by Ayup. Vol. 148. Literasi Media Publishing,n.d.
- KPU Kabupaten Malinau. "Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020." *KPU Kabupaten Malinau*. Malinau: KPU Kabupaten Malinau, 2020.

